BAB I

PENDAHULUAN

UNIKOM

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan tugas dan kewajiban seluruh aparat pemerintah di daerah. Aspek-aspek yang yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah merupakan suatu fenomena yang kompleks karena menyangkut pada seluruh segi kehidupan masyarakat. Seluruh pelaksanaan kebijaksanaan dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tersebut, memerlukan pendanaan yang sangat besar yang bersumber dari pengerahan dana masyarakat (melalui sektor pajak dan retribusi) oleh karena itu penggunaan keuangan daerah harus dilakukan seefisien mungkin.

Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka segenap aparatur pemerintahan umum di daerah, khususnya para pengelola keuangan daerah baik unsur pimpinan maupun bawahan harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh disiplin, dalam arti mentaati dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, profesional dalam arti memahami/mengerti sepenuhnya peranan atau tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan yang disertai dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai khususnya mengenai bidang keuangan.

Pelaksanaan teknis administrasi penerimaan keuangan daerah yang baik dan benar merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengelolaan penerimaan keuangan daerah karena keberadaannya dapat meningkatkan kemampuan dalam pengerahan dana masyarakat dan dapat menciptakan/memberikan informasi yang cepat dan akurat dalam hal pemerintah didalam menghimpun/mengerahkan dana masyarakat baik dari sektor pajak maupun retribusi.

Untuk itu dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman.

Untuk tahun 2001-2005 disusun Rencana Strategis Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Barat yang sesuai dengan pola dasar Pembangunan Daerah (PROPENDA) atau Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Barat tahun 2001-2005 dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Barat tahun 2001.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam laporan ini tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur penerimaan dan mengambil judul : **"Prosedur Penerimaan Pendapatan pada Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Barat".**

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dan tujuan kerja praktek adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan pendapatan pada Kantor Kas Daerah di propinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui sumber dari penerimaan pendapatan pada Kantor Kas Daerah di propinsi Jawa Barat.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Bagi penulis bahwa kerja praktek ini memungkinkan penulis bisa mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pendapatan pada Kantor Kas Daerah dan juga merupakan pengalaman bagi penulis, seandainya penulis bekerja dibidang yang sama.

2. Bagi Perusahaan

   Bagi Kantor Kas Daerah yang bersangkutan dengan adanya laporan kerja praktek ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta inisiatif dalam melakukan kegiatan di Kantor Kas Daerah.

3. Bagi pihak lain

   Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran tehadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai prosedur penerimaan pendapatan pada Kantor Kas daerah.

1.4. Metode Kerja Praktek

1. Observasi

   Artinya pengamatan langsung pada kondisi dan aktivitas yang berlangsung di Kantor Kas Daerah.

2. Wawancara

   Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun

1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek pada bagian penerimaan Kantor Kas Daerah yang beralamat di jl. Braga 12 Bandung, waktu kegiatan dimulai pada tanggal 19 juli sampai dengan tanggal 06 agustus 2004 dari jam 07.30 sampai dengan 13.30 WIB.